PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kegiatan meliputi:
    1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
        a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
        b) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
    2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
        b) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN.
        c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatasahaan dengan pengujian/verifikasi keuangan SKPD.
    3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
        a) Sub Kegiatan Melaksanakan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
        b) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
        c) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
        d) Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
        e) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material.
        f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi.
    4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
        a) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.
        b) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
        c) Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya.

    5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat.
b) Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
a) Sub Kegiatan Pengadaan Meubel.
b) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
c) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya.

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan Pajak, da Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel.
c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
d) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivtas Tenaga Kerja
1) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
a) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan klaster komptensi.
b) Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja sama sarana dan prasaran lembaga pelatihan kerja.
2) Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja swastaS ub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

3. Program Penempatan Tenaga Kerja.
1) Kegiatan Pelayanan Antarkerja di daerah Kabuoaten/Kota
a) Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja.
b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Distabilitas Ketenagakerjaan.
c) Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja
2) Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan di Daerah Kabupaten/Kota.

a) Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI/Pekerja Migran Indonesia (PMI).
b) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
c) Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan.

4. Program Hubungan Industrial

Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (satu Daerah) Kabupaten /Kota.

5. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

Kegiatan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Kabupaten/Kota.

6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pemindaan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari (satu Daerah Kabupaten/Kota.)